

**UPAYA NEGOSIASI INTEGRATIF INDONESIA DALAM
PENCAPAIAN *RESOLUTION ON FEMALE PEACEKEEPERS*
DI PBB TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional*



ILHAM BINTANG

07041281621092

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA NEGOSIASI INTEGRATIF INDONESIA DALAM
PENCAPAIAN RESOLUTION ON FEMALE PEACEKEEPERS
DI PBB TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Disusun oleh:
ILHAM BINTANG
07041281621092**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir Program
Sarjana**

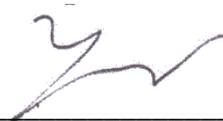
Pembimbing I

**Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003**



Pembimbing II

**Muchammad Yustian Yusa, SS, M.Si
NIP. 198708192019031006**



**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

**UPAYA NEGOSIASI INTEGRATIF INDONESIA DALAM
PENCAPAIAN RESOLUTION ON FEMALE PEACEKEEPERS
DI PBB TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Disusun oleh:
ILHAM BINTANG
07041281621092**

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 3 Agustus 2021
Dan Telah Memenuhi Syarat**

Pembimbing I

**Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003**



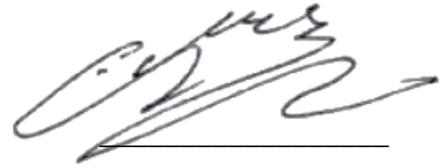
Pembimbing II

**Muchammad Yustian Yusa, SS, M.Si
NIP. 198708192019031006**



Penguji 1

**Muchammad Yusuf Abror, S.IP, M.A
NIP. 198708192019031006**



Penguji 2

**Indra Tamsyah, S.IP, M.Hub. Int
NIP. 198708192019031006**



**Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM BINTANG

NIM : 070412816210952

Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNSRI

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Negosiasi Integratif Indonesia dalam Pencapaian Resolution On Female Peacekeepers di PBB Tahun 2020 “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Indralaya, 20 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Ilham Bintang

07041281621092

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik baiknya, dengan selesainya penelitian ini, maka tuntaslah tugas untuk mengembang studi Ilmu Hubungan Internasional di kampus Sriwijaya tercinta. Adapun judul skripsi yang penulis buat adalah “Upaya Negosiasi Integratif Indonesia Dalam Pencapaian *Resolution On Female Peacekeepers* Di Pbb Tahun 2020”. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kedua orang tua ayahanda H. Idrus HAS dan Ibunda (Alm.) Hj. Maswati yang telah membesarkan dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan, doa, motivasi, semangat, dukungan dan berjuang untuk penulis hingga penulis sampai diperguruan tinggi. Terimakasih pula kepada Ibunda di Sumatra Selatan Ibu Aryuanis, A.Ma yang telah menjadi sosok ibu yang baik dan luar biasa bagi anak-anak yang jauh di rantau orang.

Salam hormat penuh kasih penulis ucapkan kepada kakak **Sri Emelda**, Abang **Richard Chayadi**, kakak **Euis Sari Mulyani**, kakak **Irmie Lenny**, Abang **Suratman**, kakak **Willya Angraini**, Abang **Nursal**, Abang **Zammil Husni**, Abang **Devi Mardisen**, kakak **Anggi Retna Dewi**, kakak **Fuji Diana Sari**, Abang **Yullius Amel**, kakak **Siti Vanny**, Abang **Susanto Ariwibowo**, Abang **Muhammad Gorbi**, dan Abang (Alm) **Tengku Luffi**. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidup penulis memberikan nasehat-nasehat sederhana yang tidak pernah bosan di berikan pada penulis, membuat penulis selalu terhindar dari hal yang buruk. Terimakasih untuk kepedulian terhadap penulis yang begitu besar. Salam kasih penulis sampaikan juga kepda keponakan-keponakan tercinta **Faris Fadhillah**, **Tsanja Zahra Sal-salbila**, **Fasa Aulia Tenera**, **Effelinne Zahra**, **Mohamad Zikri Alfarizi**, **Aisyah Merlin Devinchi**, **Ibrahim Pasha**, **Aska Rayshiva Gevino**, **Geraldine Felichia Mardisen**, **Sofia Ramadhani**, **Khalifa Dumatra**, **Nadira Mikayla**, **Geraldine Nayyanika Mardisen**, **Muhammad Fasa Alifio** yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan dalam tiap keseharian yang dilalui. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan alasan penulis berjuang menjalani proses hidup sampai detik ini.

Salam hormat dan terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya. Dan salam hormat kepada Bapak **Prof. Dr. Alfitri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Peneliti ucapkan terima kasih kepada Bapak **H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pembinaan dalam proses pengajaran di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Salam hormat dan terima kasih kepada Ibu **Dra Retno Susilowati, MM.** selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak **Dr. Muchammad Yustian Yusa, SS, M.Si** selaku dosen pembimbing 2 Skripsi ini yang telah memberikan waktu berharga untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi dan masukan dalam proses menyelesaikan

penelitian ini. Peneliti juga sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada dosen penguji Bapak **Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M. A.** dan Bapak **Indra Tamsyah, S.IP., M. Hub. Int.** yang telah berkenan arif dan bijaksana memberikan kritik dan masukan serta penilaian terhadap penelitian skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih kepada Kakak **Dimas Robi** dan Mbak **Sisca Ari Budi** yang dengan tulus telah banyak membantu dalam mempersiapkan segala keperluan administrasi.

Salam hormat penuh kasih untuk Abang **Abdul Halim, S.IP., M.A** keluarga sejati bukan tentang satu darah yang sama, namun rasa hormat dan kasih sayang kepada sesama. Seperti halnya abang yang sangat sayang dan peduli kepada adik-adiknya, apapun itu abang rela korbankan untuk kebaikan adiknya terima kasih karena sudah menjadi abang yang bisa penulis jadikan sebagai tempat berbagi. penulis berjanji akan menjadi adik yang lebih baik lagi untuk abang terima kasih banyak kami ucapkan kepada abang. Keberadaan abang membuat penulis menjadi orang yang lebih baik dan mampu menghadapi setiap proses perjalanan hidup yang telah dilewati. Teruntuk para sahabat, saudara yang tak sedarah tetapi selalu ada **Wahyu Saputra, S.Sos, Kurniawan Mardiansyah, S.Sos, Muhammad Hafidh, S.Sos, Kenken Gheovano Harahap, S.Sos, Yuschal Ilham Chairul, S.Sos, Dicky Prayoga Wicaksono, S.Sos , Ahmad Royhan Habibillah, S.Sos, Kemas Andra Kurniansyah, S.Sos** yang sudah sabar dan ikhlas menemani penulis dalam setiap proses hidup yang dijalani. Terima kasih telah menjadi sahabatku. Terima kasih telah menjadi bagian dalam sejarah hidupku, terima kasih telah menemaniku saat terpuruk menghiburku saat sedih dan terluka. Terima kasih sahabat-sahabatku, betapa bersyukurku aku memiliki sahabat seperti kalian semua.

Salam hormat dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar **Civitas Akademika Ilmu Hubungan Internasional** yang telah menjadi tempat bernaung dalam proses hidup sampai akhir ini, terkhusus kepada para rekan-rekan di Angkatan 2016 jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas kebaikan selama ini baik yang sering maupun yang jarang bertemu sehari-hari dan belum bisa disebutkan satu persatu. Salam hormat dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang saling mengenal selama menyelesaikan studi atas kebaikan selama ini dan belum bisa disebutkan satu persatu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, maka dari itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun guna berkembangnya keilmuan peneliti. Selain itu tidak lupa kata maaf disampaikan apabila dalam penyelesaian skripsi ini maupun selama menyelesaikan studi terdapat banyak kesalahan maupun kekhilafan.

Indralaya, 27 November 2021

Ilham Bintang

INTISARI

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengagendakan keterlibatan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Namun, fakta yang ada adalah masih minimnya jumlah partisipasi perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian dunia dan terus menurun setiap tahun. Berangkat dari persoalan tersebut, Indonesia menginisiasi diadopsinya Resolusi Female Peacekeepers tahun 2020. Penelitian ini melihat bagaimana upaya Indonesia dalam mencapai resolusi *female peacekeepers* melalui teori negosiasi integratif dengan dimensi *expanding pie* dan *dual concern*. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan metode pengumpulan data analisis pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah upaya negosiasi integratif melalui tahapan *expanding pie* diantaranya bagaimana Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, agenda yang dicanangkan yang berfokus pada peningkatan peran perempuan melalui pengajuan resolusi women peacekeepers. Kemudian dalam tahapan *dual concern*, Indonesia mengajukan rancangan resolusi, menggalang dukungan dari negara lain untuk ikut serta mengajukan resolusi, negosiasi informal dan proses pemungutan suara. Sehingga rancangan resolusi tersebut disetujui oleh seluruh negara anggota dewan keamanan yang kemudian diadopsi menjadi resolusi baru dengan nomor 2538 tahun 2020.

Kata Kunci : Indonesia, Negosiasi Integratif, PBB, Penjaga Perdamaian Wanita, Resolusi

ABSTRACT

The United Nations (UN) has scheduled the involvement of women in world defense defense missions. However, the fact is that the number of women's participation in world peacekeeping forces is still minimal and continues to decline every year. Departing from this problem, Indonesia initiated the adoption of the Female Peacekeepers Resolution in 2020. This study looks at how Indonesia's efforts to resolve the female peacekeepers resolution through integrative negotiation theory with dimensions of expand pie and dual concern. This study uses qualitative research methods with data collection methods library analysis. The result of this research is an integrative negotiation effort through expansion stages including how Indonesia became a non-permanent member of the UN Security Council, an agenda that focuses on increasing the role of women through the submission of peacekeeping resolutions. Then in the dual concern stage, Indonesia submitted a draft resolution, garnered support from other countries to participate in submitting the resolution, informal negotiations and the voting process. So that the draft was approved by all member states of the security council which was later adopted into a new one with number 2538 of 2020.

Keywords: *Indonesia, Integrative Negotiations, United Nations, Women Peacekeepers, Resolution*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian Objektif.....	7
1.3.2. Tujuan Penelitian Subjektif	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis.....	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Kerangka Konseptual.....	13
1.6.1. Diplomasia	13
1.6.2. Negosiasi Integratif.....	15
1.6.3. Alur Pemikiran	19
1.7. Argumentasi Utama	19
1.8. Metode Penelitian	20
1.8.1. Desain Penelitian	20
1.8.2. Defenisi Konsep	21
1.8.3. Fokus Penelitian	21
1.8.4. Unit Analisis.....	23
1.8.5. Jenis dan Sumber Data	23
1.8.6. Teknik Pengumpulan Data	24

1.8.7.	Teknik Keabsahan Data.....	24
1.8.8.	Teknik Analisis Data	25
BAB II LATAR BELAKANG		26
2.1.	Sejarah Peacekeepers di PBB	26
2.2.	Sejarah Resolusi Woman Peacekeepers	31
BAB III PEMBAHASAN.....		37
3.1.	<i>Expanding Pie</i>	38
3.1.1.	Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.....	38
3.1.2.	Agenda, Tugas dan Manfaat Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020.....	43
3.1.3.	Agenda <i>Women Peacekeepers</i> oleh Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB	47
3.2.	<i>Dual Concern</i>	50
3.2.1.	Tahapan Pengajuan Rancangan Resolusi <i>Women Peacekeepers</i> oleh Indonesia	51
3.2.2.	Tahapan menggalang dukungan negara lain dalam pengajuan Resolusi <i>Women Peacekeepers</i>	56
3.2.3.	Tahapan Negosiasi dan Pemungutan Suara Resolusi <i>Women Peacekeepers</i>	58
3.2.4.	Para Anggota Dewan Keamanan mendukung dan menyetujui Resolusi <i>Women Peacekeepers</i>	60
BAB IV PENUTUP		67
4.1.	Kesimpulan	67
4.2.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka	9
Tabel 1.2 Fokus Penelitian	22
Tabel 3.1 Daftar Negara Anggota DK PBB 2019 – 2020	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Capaian Negosiasi	16
Gambar 2.1 Jumlah Pasukan <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia 2009-2016.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peacekeeping atau pasukan penjaga perdamaian adalah suatu instrumen yang dikembangkan sebagai cara untuk membantu suatu negara yang mengalami konflik untuk menciptakan perdamaian/kondisi damai. *Peacekeeping* sebenarnya tidak tercantum dalam piagam PBB, akan tetapi Sekretaris Piagam PBB menjelaskan *Peacekeeping* sebagai “*Chapter six and a Half*” karena posisinya dipandang berbeda di antara Bab VI dari Piagam PBB. *Peacekeeping* menjadi salah satu metode tradisional PBB dalam upaya penyelesaian konflik melalui cara cara damai, dengan cara penyelesaian melalui negosiasi, mediasi atau dengan metode penggunaan kekuatan secara paksa (Osmancavusoglu, 2000).

Operasi perdamaian merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik suatu negara menuju suatu perdamaian. Operasi yang dilakukan melibatkan pasukan anggota tentara, polisi dari seluruh dunia yang mengintegrasikan mereka ke dalam pasukan perdamaian dengan tujuan melakukan perdamaian yang bersifat multidimensional. Operasi perdamaian PBB memberikan jaminan keamanan dan dukungan politik untuk membantu negara yang berkonflik dalam menjalankan proses transisi dari yang sebelumnya berkonflik menuju perdamaian (Paramasatya, 2015).

Peacekeeping Operations (PKO) pertama kali dibentuk untuk menjalankan tugas yang relatif standar untuk melakukan proses bina damai yang berkelanjutan dan mengembalikan kondisi kondusif bagi melaksanakan perdamaian. *Peacekeeping Operations* (PKO) melaksanakan mandat melalui patroli perbatasan serta pemisahan pihak yang berkonflik. Tugas dan tanggung jawab ini mulai berkurang selama dua puluh

tahun belakangan, setelah perang antar negara mulai berkurang dan digantikan oleh konflik antar negara dan antar-etnis yang lebih kompleks, Hal ini merupakan tantangan baru bagi masyarakat internasional termasuk komunitas penjaga perdamaian. Dalam menghadapi tantangan baru, diperlukan berbagai macam pendekatan yang bersifat multidimensional. Pendekatan multidimensional membahas masalah yang sesuai dengan perdamaian antara lain melindungi populasi lokal melalui pendekatan pemahaman budaya lokal, agama, adat istiadat, dan cara hidup. Pendekatan kemanusiaan seperti memfasilitasi melaksanakan kebijakan keamanan baru yang responsif sangat dibutuhkan guna mengakomodasi kebutuhan dan masalah yang berbeda (Paramasatya, 2015).

Misi *peacekeeping* yang pertama kali dilakukan oleh PBB ialah *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) yang didirikan pada tahun 1948 sebagai pemantauan atas gencatan senjata antara Arab Saudi dan Israel (Indrawan, 2020). Melalui *Resolusi* Dewan Keamanan PBB No. 50 yang diadopsi pada tanggal 29 Mei 1948 mengenai tugas UNTSO, meminta semua pemerintah dan otoritas yang terlibat dalam konflik di Palestina untuk memerintahkan penghentian semua tindakan angkatan bersenjata. *Resolusi* ini selanjutnya mendesak semua pemerintah dan otoritas untuk melakukan semua yang mereka bisa, agar memastikan keamanan di tempat-tempat Suci di daerah tersebut serta kota Yerusalem guna memastikan akses keamanan, menginstruksikan mediator PBB di Palestina untuk melakukan kontak dengan semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa gencatan senjata dilaksanakan dan menawarkannya sebanyak mungkin pengamat militer yang diperlukan untuk tujuan tersebut (Indrawan, 2020). Pada Agustus 1949, Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 73 memberikan fungsi yang berbeda pada UNSTO yang selaras dengan empat perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan empat negara Arab yang diantaranya Mesir,

Yordania, Suriah, dan Lebanon. UNSTO melakukan aktivitas meliputi kelima negara tersebut, pengamat militer UNSTO tetap tinggal di kawasan Timur Tengah guna mengamati gencetan senjata, menyupervisi perjanjian gencetan senjata, mencegah insiden kecil yang berkemungkinan menjadi besar dan membantu operasi perdamaian PBB lainnya di wilayah tersebut (Indrawan, 2020).

Pemeliharaan perdamaian PBB merupakan tindakan kolektif yang dilakukan dalam upaya perdamaian dan keamanan di dunia. Dalam perkembangannya, PBB telah mengagendakan keseimbangan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian. Perempuan pemelihara perdamaian diperkenalkan sejak tahun 1957. Dalam periode 1957-1979 hanya terdapat 65 orang perempuan dari 6.250 personil. Jumlah ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 200 dari 20.000 personil militer pada tahun 1989.

Konsentrasi PBB pada peran pasukan perdamaian perempuan semakin dikuatkan dengan diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tahun 2000 tentang “*Women, Peace and Security*”. Resolusi tersebut menyatakan bahwa isu gender telah menjadi fokus perhatian dalam agenda perdamaian dan keamanan dunia. Kehadirannya mengajak seluruh negara anggota PBB untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dimana fokus utamanya adalah partisipasi, proteksi bantuan dan pemulihan. Selain itu, resolusi ini juga membahas tentang partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik, rekrutmen *military officers* dan prajurit (Osmancavusoglu, 2000).

Pada tahun 2006 hanya terdapat peningkatan keikutsertaan perempuan dalam pasukan perdamaian. Angka ini hanya mencapai 1.235 dari 65.555 yang merupakan 1,8% dari angka keseluruhan anggota pasukan perdamaian. Sedangkan pada tahun 2007 terdapat 1.034 perempuan dari 71.673 yang merupakan 1,7% dari keseluruhan

(Osmancavusoglu, 2000). Hal tersebut merupakan penurunan dari angka keikutsertaan perempuan dalam operasi perdamaian dunia.

Lambatnya peningkatan partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian ini tidak terlepas dari dunia militer dimana hanya didominasi oleh laki-laki. Wilayah militer dianggap sebagai ruang yang lebih tepat untuk laki-laki sehingga personel militer juga lebih banyak oleh laki-laki, padahal perannya perempuan dalam militer juga tidak kalah dibutuhkan dalam membangun perdamaian, memberikan akses dan dukungan kepada perempuan zona konflik/lokal, mendukung kebutuhan spesifik dari perempuan dan anak-anak, menggali informasi mengenai kekerasan terhadap *gender* serta membuat misi menjadi lebih ramah *gender*. Hal ini tidak dapat diabaikan bahwa perempuan rentan menjadi korban perang seperti, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan lain sebagainya, untuk itu perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan suatu kebutuhan (Osmancavusoglu, 2000).

Persoalan gender ternyata bukan hanya terjadi pada timpangnya jumlah anggota pasukan perdamaian, akan tetapi juga terjadi pada pelaksanaan program pemeliharaan damai. Salah satu misi PBB dalam pemeliharaan perdamaian yang menghadirkan masalah baru terkait gender adalah *United Nations Stabilization Mission In Haiti* (MINUSTAH). Awalnya misi ini dibentuk untuk mendukung pemerintah transisi dalam memastikan lingkungan yang aman dan stabil, serta memantau dan mereformasi Polisi Nasional Haiti. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masalah baru hadir. Pasukan perdamaian yang diharapkan bekerja secara optimal dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas politik serta keamanan ternyata melakukan pelecehan seksual pada anak laki-laki dan perempuan (Dodd, 2017).

Sebanyak 134 pasukan perdamaian, yang berkewarganegaraan Sri Lanka

melakukan eksploitasi seksual dari tahun 2004 hingga tahun 2007 terhadap warga Haiti. Data survei yang dihimpun oleh Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat Amerika Serikat terdapat 2916 orang yang diwawancarai, jumlah tersebut menjelaskan terdapat dua kelompok yang menjadi korban mulai rentang usia 13-24 dengan jumlah 1.457 wanita dan 1459 laki-laki. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa korban pelecehan seksual yang terbanyak justru berasal dari jenis kelamin laki-laki. Adapun rinciannya korban pelecehan seksual rentang usia 13-17 4% perempuan dan 7% laki-laki. Selanjutnya pada rentang usia 17-24 tahun, persentase laki-laki juga masih lebih banyak dari perempuan yakni 84,4% laki-laki dan 69.5%. perempuan (Dodd, 2017).

Berangkat dari persoalan-persoalan gender yang terjadi di ranah pasukan perdamaian dalam operasi yang dilakukan, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi baru no. 2538 Tahun 2020. Resolusi ini menjelaskan bahwa pentingnya setiap negara anggota berkomitmen melaksanakan peningkatan jumlah anggota pasukan perdamaian perempuan dalam agenda keamanan dunia. Negara anggota wajib mempromosikan secara penuh dan memberikan partisipasi pada perempuan untuk melaksanakan promosi perdamaian, meningkatkan kontribusi perempuan dalam melaksanakan proses perdamaian dan terus mengutamakan kesetaraan *gender* karena peran wanita sangat di perlukan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasi penjaga perdamaian (Nation, 2020).

Indonesia sangat berkontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam agenda perdamaian dan agenda keamanan. Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2020 merupakan resolusi pertama yang dihasil dari perjuangan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Resolusi ini didukung oleh 97 negara anggota (Setkab, 2020).

Isi dari resolusi nomor 2538 Tahun 2020 merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB guna menunjukkan wujud sumbangsih Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan sebagai pasukan perdamaian khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal tersebut merupakan terobosan penting karena untuk kali pertamanya Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang secara khusus mengangkat peran perempuan penjaga perdamaian dunia. Dukungan luar biasa juga diberi oleh negara negara anggota PBB guna memperjuangkan diplomasi perdamaian dan pemberdayaan peran perempuan dalam perdamaian sejak awal keanggotaannya di DK PBB tahun 2019. Hal ini membuktikan peran Indonesia aktif sebagai “*bridge builder*” yang tidak hanya berhasil membuka jalan perbedaan posisi tetapi juga mempersatukan DK PBB (Kemlu, 2020). Berdasarkan penjabaran diatas, peran serta perempuan dalam pasukan perdamaian masih sangat minim dikarenakan sedikitnya resolusi dan kebijakan yang membicarakan hal tersebut hingga pada tahun 2020 Indonesia secara vokal memperjuangkan resolusi terkait hal tersebut berangkat dari gencarnya perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan resolusi terkait perempuan dan pasukan penjaga perdamaian, penulis mengambil judul penelitian “Upaya Negosiasi Integratif Indonesia Dalam Pencapaian *Resolution On Female Peacekeepers* Di PBB Tahun 2020”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: **“Bagaimana Upaya Negosiasi Integratif Indonesia Dalam Pencapaian *Resolution on Female Peacekeepers* Di PBB Tahun 2020?”**

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian Objektif

Untuk menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mencapai *Resolution on Female* di PBB

1.3.2. Tujuan Penelitian Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
- b. Memperluas pemahaman teori dan aplikasinya dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menjelaskan bagaimana peran Indonesia sebagai aktor yang menjembatani *Resolution on Female* 2020 di PBB

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan baru bagi Indonesia dan Negara lainnya terkait rancangan resolusi *female peacekeepers* dalam upaya menjaga perdamaian dunia.

1.5.Kajian Pustaka

Dalam menganalisis judul yang diangkat, peneliti mencoba bersandar pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian. Kajian pustaka yang dijadikan landasan dalam penelitian ini antara lain adalah “*Indonesian Female Peacekeepers in The United Nations Peacekeeping Mission*” oleh Leonard F. Hutabarat dalam Jurnal Pertahanan. Jurnal ini menjelaskan tentang pemeliharaan perdamaian yang berkembang sebagai pendekatan kemanusiaan yang lebih luas maka dari itu personil wanita termasuk kedalam personil penjaga perdamaian. PBB telah mengerahkan pasukan perdamaian perempuan dalam meningkatkan pendekatan “*holistic*” terhadap setiap operasi penjaga perdamaian. Pada bulan Oktober 2000, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Kemudian Resolusi ini dipuji sebagai resolusi yang penting dan Dewan Keamanan mengakui kontribusi perempuan selama dan pasca konflik

Dalam kajian pustaka yang kedua, peneliti bersandar pada judul “*The United Nations Peacekeeping Operations and Challenge*” oleh Athambawa Sarjoon dan Mohammed Agus Yusoff dalam *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. Jurnal ini menjelaskan perserikatan bangsa-bangsa di beri mandate untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Banyak kebijakan yang di lakukan oleh PBB dalam memperkuat operasi kebijakan perdamaian. Kebijakan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tujuan PBB yaitu menjaga perdamaian, melakukan pemeliharaan perdamaian. Namun dalam hal menjaga perdamaian, PBB masih menemukan masalah dan tantangan yang negatif yang mempengaruhi efisiensi, efektivitas dan keberhasilan operasi pemeliharaan perdamaianya.

Dalam kajian pustaka yang ketiga, peneliti berlandaskan dalam jurnal “*Indonesian participation in the UN peacekeeping as an instrument of foreign police: Chalanges an Opportunities*” oleh Leonard F. Hutabarat dalam jurnal *Global & Strategis*. Jurnal ini menjelaskan tentang partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian oleh Perserikatan bangsa-bangsa sebagai instrument kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pemahaman realis bahwa partisipasi dalam melakukan operasi penjaga perdamaian dimaksud dapat memenuhi kepentingan nasional. Namun Indonesia masih belum mendefinisikan suatu arah yang jelas guna memandu posisi dan sikapnya dalam masalah ini. Menurut jurnal ini, strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan strategis dan keseluruhan.

Dalam kajian pustaka yang keempat, peneliti ingin bersandar dalam jurnal “Identitas dan kepentingan Indonesia berpartisipasi dalam *UN Peacekeeping Operations* pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” oleh Rani Eka Syahputri dalam *Journal of International Relations*. Jurnal ini menjelaskan bahwa konflik merupakan aspek yang tidak dapat dihindarkan dalam kondisi sosial. Operasi penjaga perdamaian menjadi salah satu bentuk dari organisasi PBB untuk membantu negara konflik menjadi negara damai dengan membangun militer, polisi hingga pasukan sipil. Indonesia adalah negara yang berperan aktif dalam meningkatkan operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Leonard F. Hutabarat

	Judul	Indonesian <i>Female Peacekeepers in The United Nations Peacekeeping Mission</i>
	Jenis Penelitian	Jurnal Pertahanan
	Tahun	2017
	Hasil	Menjelaskan tentang pemeliharaan perdamaian yang berkembang sebagai pendekatan kemanusiaan yang lebih luas dimana personil wanita berkontribusi dalam menjaga perdamaian. Jurnal ini juga menyatakan bahwa PBB telah mengerahkan pasukan perdamaian perempuan dalam meningkatkan pendekatan secara <i>holistic</i> dalam setiap operasi yang dilakukan.
	Perbandingan	Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana kontribusi Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan dalam operasi penjaga perdamaian
2	Nama Penulis	Athambawa Sarjoon dan Mohammed Agus Yusoff
	Judul	<i>The United Nations Peacekeeping Operations and Challenge</i>
	Jenis Penelitian	<i>Academic Journal of Interdisciplinary Studies</i>
	Tahun	2019

	Hasil	Jurnal ini menjelaskan bahwa PBB di beri mandat untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Kebijakan yang di buat oleh PBB dalam memperkuat operasi perdamaian dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tujuan PBB yaitu menjaga perdamaian internasional.
	Perbandingan	dalam jurnal ini membuat peneliti ingin mengetahui peran Indonesia dalam penerapan kebijakan operasi penjaga perdamaian yang dilakukan oleh PBB
3	Nama Penulis	Leonard F. Hutabarat
	Judul	Indonesian <i>participation in the UN peacekeeping as an instrument of foreign police : Chalanges an opportunities</i>
	Jenis Penelitian	Jurnal Global & Strategis
	Tahun	2014
	Hasil	Jurnal ini menjelaskan tentang pastisipasi perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian oleh Perserikatan bangsa-bangsa sebagai instrument kebijakan luar negeri Indonesia. berdasarkan pemahaman realis bahwa partisipasi dalam melakukan oparasi penjaga perdamaian dimaksud dapat memenuhi kepentingan

		nasional. Namun Indonesia masih belum mendefinisikan suatu arah yang jelas guna memandu posisi dan sikap nya dalam masalah ini.
	Perbandingan	Dalam hal ini peneliti ingin melihat apa saja yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan dalam menjaga perdamaian internasional.
4	Nama Penulis	Rani Eka Syahputri
	Judul	Identitas dan kepentingan Indonesia berpartisipasi dalam <i>UN Peacekeeping Operations</i> pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
	Jenis Penelitian	<i>Journal of International Relations</i>
	Tahun	2018
	Hasil	Jurnal ini menjelaskan bahwa konflik merupakan aspek yang tidak dapat dihindarkan dalam kondisi sosial. Operasi penjaga perdamaian menjadi salah satu bentuk dari organisasi PBB untuk membantu negara konflik menjadi negara damai dengan membangun militer, polisi hingga pasukan sipil. Indonesia berkontribusi aktif dalam meningkatkan operasi perdamaian.

	Perbandingan	Dalam hal ini peneliti ingin melihat apa yang menjadi kontribusi Indonesia dalam meningkatkan human peacekeeping di berbagai negara konflik.
--	--------------	--

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Diplomasi

Diplomasi dalam kajian internasional merupakan salah satu praktek ataupun interaksi antar negara melalui perwakilan-perwakilan resmi yang meliputi seluruh proses baik hubungan luar negeri maupun formasi kebijakan. Diplomasi merupakan tehnik-tehnik operasional untuk memperjuangkan kepentingannya yang dilakukan oleh negara melalui hukum (Plano, 1982). Dalam artian luas, diplomasi mencakup seluruh kegiatan politik luar negeri dalam hubungannya dengan negara lain yang meliputi menentukan dan mempergunakan semua daya atau kemampuan manusia untuk mencapai tujuan, menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional, sesuai dengan kemampuan dan tenaga yang ada, menentukan apakah tujuan nasional sejalan dengan kepentingan bangsa atau negara lain dan mempergunakan sarana dan kesempatan dengan sebaik-baiknya (Deplu, 1988).

Diplomasi dapat dilakukan melalui atau oleh departemen ataupun kementerian luar negeri, kedutaan besar, konsulat-konsultan, legasi-legasi dan misi-misi khusus di seluruh dunia. Diplomasi pada umumnya memiliki berbagai kepentingan mulai dari hubungan antar negara sampai dengan permasalahan perang dan damai yang jika diplomasi mengalami kegagalan maka akan

mengarah pada bahaya perang yang menimbulkan krisis (Roy L, 1995). Herman F. Eilts mengatakan diplomasi merupakan sebuah ilmu ataupun seni yang harus dilakukan yang berkaitan dengan hubungan ataupun urusan-urusan negara-negara berdaulat dengan menggunakan sarana agen-agen resmi dan diakui, sedangkan menurut hukum internasional diplomasi merupakan prosedur yang dilakukan dalam manajemen negosiasi internasional (Plischke, 1979). Sederhananya, diplomasi diartikan sebagai proses politik yaitu melakukan hubungan-hubungan luar negeri satu sama lain yang dilakukan oleh entitas politik dalam hal ini negara dalam lingkungan internasional (Ambarwati, 2010).

Secara *etimologis*, istilah diploma berasal dari bahasa latin yang diartikan sebagai kepercayaan. Dalam perkembangannya, kata ataupun kalimat diploma kemudian berubah lebih luas menjadi kata diplomati, diplomasi dan diplomatik (Kansil, 2002). Proses politik yang disebut sebagai diplomasi pada awalnya berlangsung pada ratusan tahun sebelum masehi atau zaman kuno. Dahulu, orang China, Mesir, India dan Mesopotamia telah mengirimkan dan menerima utusan-utusan dari negara lain yang ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan dan menjalin kesepakatan perdamaian (Ambarwati, 2010). Sedangkan di dunia barat, diplomasi modern bermula pada abad ke 13 dimana penguasa-penguasa wilayah di eropa mengirimkan utusan kepada penguasa wilayah lainnya yang ditugaskan untuk menyampaikan pandangan dan berunding serta membuat kesepakatan atas nama penguasa yang diwakilkan tersebut kepada penguasa yang dituju. Perkembangan diplomasi semakin meluas dengan adanya Kongres Wina 1815. Para negarawan Eropa sadar akan perlunya mengatur hubungan diplomatik antar negara. Hingga akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, Komisi Hukum

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 membuat rancangan konvensi diplomatik yang mengatur tugas dan tanggung jawab korps diplomatik (Plischke, 1979).

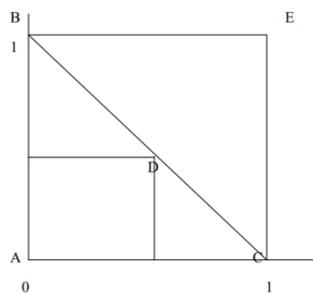
Perkembangan diplomasi telah melahirkan berbagai aturan mengenai teknis hubungan *diplomatic* dan hubungan internasional lainnya seperti Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik beserta protokol-protokol pilihan, Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler beserta protokol-protokol pilihan, Konvensi *New York* 1969 tentang misi khusus beserta protokol-protokol pilihan, Konvensi *New York* 1973 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional di lindungi termasuk para diplomat, dan Konvensi Wina 1975 tentang keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal.

1.6.2. Negosiasi Integratif

Dalam Diplomasi memiliki elemen pendukung di dalamnya, salah satunya ialah menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah proses yang penting dalam pembuatan sebuah keputusan secara interpersonal yang tidak bisa dilakukan dengan satu pihak saja (Thomson, 2012). Konsep negosiasi memiliki banyak arti, namun para ahli menyetujui, bahwa tujuan utama dari kegiatan negosiasi adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Menurut Zartman mendefinisikan Negosiasi ialah merupakan bagian dari diplomasi, namun memiliki ruang lingkup yang luar biasa lebih dari tawar-menawar (Zartman, 2019). Adapun R.P Bartson menekankan bahwa negosiasi tidak selalu mengenai kesepakatan, namun merupakan upaya untuk saling memahami posisi

antar pihak-pihak terlibat yang memiliki kepentingan (Bartson, 2019). Di dalam negosiasi terdapat bentuk negosiasi salah satunya Negosiasi *Integratif* ialah dengan menekankan pada *Fix- pie* yang dapat diasumsikan sebagai kepentingan tersebut bersifat kongkrit. Dalam menghadirkan sebuah negosiasi, para aktor ditekankan untuk mencapai kepentingan yang tidak bisa di ubah (Trisni, Nasir, & Halim, 2019).

Gambar 1.1 Capaian Negosiasi



Sumber: (Diplomasi Sebuah pengenalan awal, 2019)

Dari diagram tersebut menjelaskan bahwa pada poin A negosiasi tidak menemukan hasil apapun dari para pihak yang melakukan negosiasi tersebut pulang dengan tidak membawa hasil dan capaian apapun dari negosiasi tersebut. Dapat di artikan ialah negosiasi yang berlangsung tersebut tidak terjadi apapun. Pada poin B dan C merupakan pengertian dari negosiasi Distributif yang merupakan bentuk kemenangan dan salah satu pihak tidak mendapatkan apa-apa dalam rundingan negosiasi yang dilakukan (*victory for one*). Poin D agak sedikit lebih fleksibel dimana pada poin D menekankan pada bentuk kompromi yang memusatkan pada tercapainya suatu kepentingan masing-masing pihak walau hasilnya tidak maksimal sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dalam pencapaian awal (Trisni, Nasir, & Halim, 2019).

Pada Poin E merupakan pendekatan yang menghasilkan suatu hasil *win-win solution*. Pendekatan inilah yang di gunakan sebagai diplomasi dalam melakukan

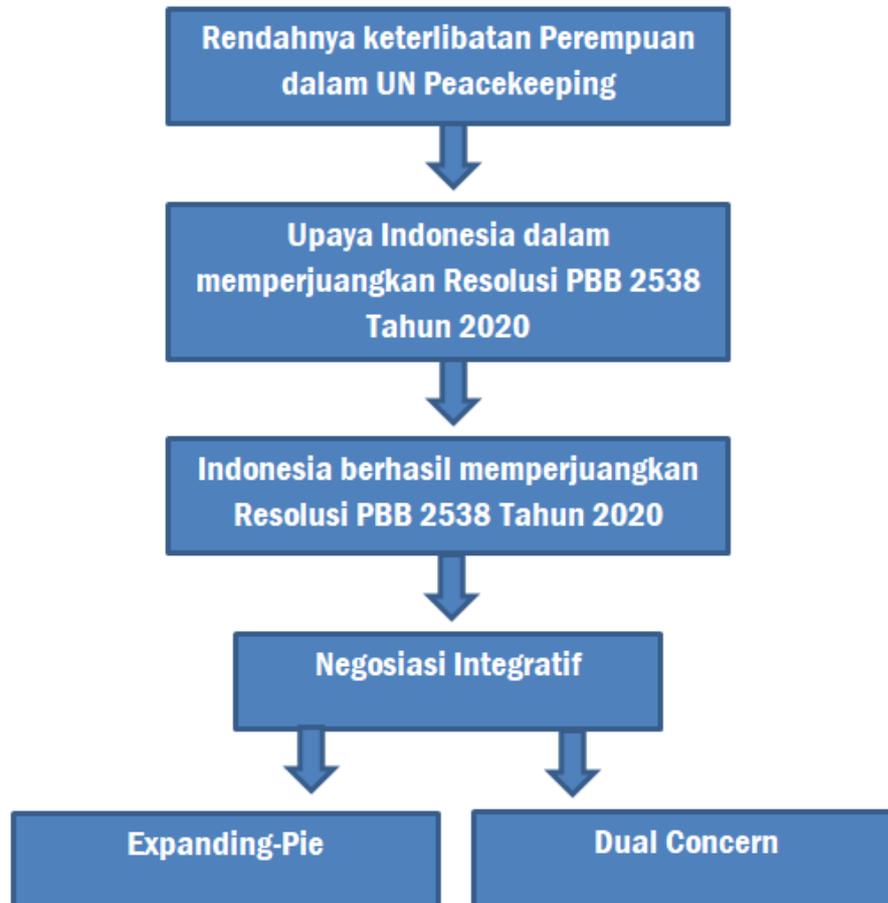
negosiasi di dalam setiap kepentingan (Trisni, Nasir, & Halim, 2019). Thompson menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *the mind and heart of negotiator* bahwa *win win negotiation* adalah negoisasi yang dilakukan berdasarkan pada peluang bagi semua pengguna yang memungkinkan untuk digunakan sehingga mendapatkan sebuah hasil yang dapat menguntungkan semua pihak yang kemudian di kenal sebagai negoisasi intergratif (Thomson, 2012) Negoisasi integratif ini banyak menjelaskan tentang menentukan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari kedua belah pihak yang berunding, bukan hanya memberatkan kepada salah satu pihak (Trisni, Nasir, & Halim, 2019).

Konteks negoisasi integratif di kenal dengan istilah "*expanding-pie*" dimana "*expanding-pie*" ini menjadi faktor yang membedakan antara negoisasi integratif dan negoisasi yang lain. *Expanding-pie* ini dimaksudkan memperluas apa yang menjadi tujuan dari sebuah negoisasi yang dilakukan dari pihak terkait (Thomson, 2012). Usaha melakukan *expanding pie* diperlukan pemahaman tentang apa yang menjadi kebutuhan pokok utama dalam lawan banding, bukan dilihat dari lawan berunding. Jadi dalam *expanding pie*, pihak yang bernegosiasi harus memahami betul tentang maksud dan tujuan dalam bernegosiasasi, kemudian memahami karakter lawan bernegosiasi. Defenisi ini mampu menunjukan nengoisasi integratif menekankan pada "*dual Concern*". Bukan hanya menitik beratkan pada kepentingan sepihak saja, juga mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan pihak yang lainnya dengan melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak (Trisni, Nasir, & Halim, 2019). *Dual concern* menekankan pada bagaimana pihak yang bernegosiasi harus memahami betul apa yang menjadi kepentingan pihak dan harus memahami kebutuhan masing-masing antara lawan bernegosiasi agar tujuan bisa terlaksana dengan kedua pihak saling menguntungkan dan

mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah itu ketika sudah memahami kepentingan dari lawan bernegosiasi, barulah akan mendapatkan titik temu dari kedua belah pihak sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak merugikan salah satu pihak bernegosiasi.

Asumsi pendekatan integratif mampu mencakup banyak hal yang diperlukan bagi berbagai pihak “*Dual Concern*” pendekatan integratif mampu memberikan banyak dampak positif bagi kedua belah pihak yang dalam proses bernegosiasi. *Dual concern* yang kemudian mempermudah para pihak yang melakukan negosiasi untuk melakukan *expanding pie* dari apa yang menjadi kebutuhan ke dua belah pihak yang sedang bernegosiasi terkait masalah kemanusiaan yang menjadi fokus dalam negosiasi tersebut. Intinya adalah dengan melakukan negosiasi integratif dalam diplomasi kemanusiaan, semua pihak mampu mencapai apa yang menjadi kebutuhan sehingga menemukan jalan tengah yang mampu memberikan *win-win solution* dalam persoalan yang sedang dihadapi tanpa mengesampingkan pihak lain (Trisni, Nasir, & Halim, 2019)

1.6.3. Alur Pemikiran



1.7. Argumentasi Utama

Female peacekeepers dibutuhkan dinegara berkonflik karena banyaknya masalah yang ada. Dukungan *female peacekeepers* pada perannya untuk perempuan zona konflik atau lokal, mendukung kebutuhan spesifik dari perempuan dan anak-anak, menggali informasi mengenai kekerasan terhadap *gender* serta membuat misi menjadi lebih ramah *gender* sehingga dibutuhkan lebih banyak *female peacekeepers* di kawasan-kawasan berkonflik tersebut. Indonesia pada tahun 2020 sebagai aktor yang menjembatani dalam resolusi 2538 (2020). Resolusi menjelaskan bahwa pentingnya setiap negara anggota

berkomitmen melaksanakan *women peace* dan agenda keamanan guna penyelesaian persoalan-persoalan yang dipaparkan sebelumnya. Agenda Indonesia dalam pencapaian kepentingan ini adalah dengan menggunakan pendekatan negosiasi integratif yang didalamnya terdapat *expanding-pie* dengan memperluas apa yang menjadi tujuan dari sebuah negosiasi yang dilakukan dari pihak terkait melalui penentuan agenda yang akan diajukan serta langkah yang akan diambil dan *dual concern* yang merupakan sebuah proses yang penting dalam pembuatan sebuah keputusan secara interpersonal yang tidak bisa dilakukan dengan satu pihak saja. Hal ini akan menganalisis tiap tahapan dan proses negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mendekati negara-negara anggota lainnya untuk menyetujui agenda yang direncanakan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Prosedur dalam mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dapat digambarkan serta didapatkan dengan melakukan desain penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami fenomena atau makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Proses penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisa data data, mencari sumber sumber terpercaya, pengumpulan data spesifik, menganalisis data secara induktif dan menarik kesimpulan dari data yang ada. Peneliti menggambarkan dan menyampaikan masalah secara cermat

dan lengkap mengenai upaya Indonesia dalam pencapaian *resolution on female peacekeepers* tahun 2020 di PBB.

1.8.2. Defenisi Konsep

- a. *Female peacekeepers* adalah wanita dengan berbagai peran dan tugas yang sangat penting, yang tergabung di dalam misi perdamaian PBB. Sebagai pasukan penjaga perdamaian, mewakili PBB berada pada suatu Negara untuk membantu mengembalikan kepercayaan orang-orang yang mengalami trauma akibat pertikaian (Osmancavusoglu, 2000).
- b. *Resolution* adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui consensus maupun pemungut suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Organisasi Internasional atau badan yang bersangkutan (Kemlu RI, 2021).
- c. *Negosiasi* adalah sebuah proses yang sangat penting dalam pembuatan sebuah keputusan secara interpersonal yang tidak dimungkinkan bisa dilakukan oleh satu pihak saja (Thomson, 2012)

1.8.3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan hasil dari studi pendahuluan, referensi, pengalaman serta saran dari pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Berangkat dari Konsep Negosiasi Integratif yang dihadirkan oleh Thomson dalam buku *The Mind and Heart of the Negotiator*, peneliti menurunkan fokus penelitian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Upaya Negosiasi Integratif Indonesia Dalam Pencapaian <i>Resolution On Female Peacekeepers</i> di PBB Tahun 2020	<i>Expanding-pie</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan strategi awal 2. Perencanaan agenda bersama yang menjadi fokus pembahasan 	Menjelaskan tujuan Indonesia dalam melakukan negosiasi integratif untuk pencapaian <i>Resolution on Female Peacekeepers</i> di PBB tahun 2020 dengan menentukan Langkah awal dan perencanaan agenda
	<i>Dual concern</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan agenda pembahasan 2. Penggalangan dukungan 3. Negosiasi dan penentuan hasil negosiasi 	Menjelaskan proses negosiasi integratif yang dilakukan Indonesia dengan memahami kebutuhan bersama antar anggota hingga disetujui oleh anggota dewan keamanan PBB dalam <i>Resolution on Female Peacekeepers</i>

Penelitian ini akan menggunakan Negosiasi Integratif sebagai variable penelitian yang diturunkan dalam dua dimensi utama yakni *Expanding pie* dan *Dual concern* (Thomson, 2012). Masing-masing dimensi memiliki indicator yang akan digunakan sebagai pisau analisis peneliti. Pada dimensi *Expanding pie*, indikator yang digunakan adalah memperluas tujuan sebuah negosiasi dan memahami kebutuhan lawan bernegosiasi. Sedangkan pada dimensi *dual concern*, indikator yang digunakan adalah menentukan titik temu dari kepentingan-kepentingan lawan berunding.

1.8.4. Unit Analisis

Unit analisis merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Unit analisis memiliki beberapa tingkatan dari mulai individu, kelompok, organisasi, negara hingga sistem internasional. Pada penelitian kali ini, peneliti meletakkan unit analisis pada negara yakni Indonesia dengan unit eksplanasi yakni upaya Indonesia dalam capaian resolusi PBB terkait isu women peacekeepers pada tahun 2020.

1.8.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yang menjelaskan data-data yang didapatkan terkait upaya Indonesia dalam pencapaian *resolution on female peacekeepers* tahun 2020 di PBB. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian, dan tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang

diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. data yang diperoleh dari buku, jurnal maupun media cetak atau online yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode berbasis Studi Dokumen. Metode ini digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber berdasarkan pengamatan penulis meliputi buku, jurnal, laporan-laporan lembaga terkait, serta sumber internet terpercaya seperti website kementerian luar negeri dan United nations.

1.8.7. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu yang berbeda dan dari berbagai sumber melalui cara dan waktu yang beragam (Sugiyono, 2013). Menurut Densin dan Moelong (Sugiyono, 2013) terdapat empat jenis triangulasi antara lain triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menguji kredibilitas data dengan mengecek data dari berbagai sumber. Triangulasi metode adalah pengecekan keabsahan data dengan pengecekan tingkat kepercayaan penemuan

hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama.

1.8.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman yaitu (Sugiyono, 2013):

- a) Pengumpulan data yaitu aktivitas mengumpulkan data yang telah didapat dengan beberapa metode seperti metode berbasis Internet, dokumentasi, buku yang dapat mendukung penelitian penulis.
- b) Reduksi data yaitu proses pemilihan kembali teori serta konsep yang berhubungan dengan hasil penelitian yang sudah dilalui.
- c) Penyajian atau penampilan data merupakan hasil dari reduksi data yang ditampilkan sedemikian rupa agar pembaca bisa memahami hasil – hasil data yang telah penulis dapatkan.
- d) Penarikan kesimpulan setelah adanya data – data serta temuan penelitian maka akan ditarik kesimpulannya, sehingga dalam hal ini penarikan kesimpulan ini diperlukan verifikasi sebelum akhirnya finalisasi kesimpulan.

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan untuk institusi terkait serta peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan fokus pada penelitian serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. (2018, Juni 12). *Jokowi Ungkap Alasan RI Berhasil Jadi Dewan Keamanan PBB*. Retrieved from [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20180612143601-4-18915/jokowi-ungkap-alasan-ri-berhasil-jadi-dewan-keamanan-pbb):
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180612143601-4-18915/jokowi-ungkap-alasan-ri-berhasil-jadi-dewan-keamanan-pbb>
- Ambarwati, D. R. (2010). *Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali.
- Bartson, R. (2019). *Modern Diplomacy Fourth Edition*. In P. E. Sofia Trisni, *Diplomasi : Sebuah Pengenalan Awal* (p. 75). Padang.
- Boeike Adam Noor. (2019, November 27). *Alasan Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB*. Retrieved from [uinjkt.ac.id](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50062/1/BOEIKE%20ADAM%20NOOR.FISIP.pdf):
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50062/1/BOEIKE%20ADAM%20NOOR.FISIP.pdf>
- Deplu, L. (1988). *Diplomasi Indonesia*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Dian Septiari. (2019, Desember 17). *Indonesia to prioritize quality in peacekeeping contributions as UN funds evaporate*. Retrieved from [jakartapost.com](https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/17/indonesia-to-prioritize-quality-in-peacekeeping-contributions-as-un-funds-evaporate.html):
<https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/17/indonesia-to-prioritize-quality-in-peacekeeping-contributions-as-un-funds-evaporate.html>
- Dodd, P. (2017, April 14). *UN peacekeepers in Haiti ran child sex rings, raped women: AP investigation*. Retrieved November 13, 2020, from Global News:
<https://globalnews.ca/news/3380202/un-peacekeepers-child-sex-haiti/>
- Hiraswari, I., Widastuti, G. N., & Veronica. (2020, September 2). *Indonesia's UN Security Council drive for inclusive peace and security*. Retrieved from The Interpreter: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-un-security-council-drive-inclusive-peace-and-security>
- Hutabarat, L. F. (2017). THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN FEMALE PEACEKEEPERS IN THE UNITED NATIONS PEACEKEEPING MISSION. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara Volume 7 Nomor 2*.
- Indrawan, R. M. (2020). Pemahaman Kompetensi Lintas Budaya Bagi UNTSO (United Nations Truce Supervision Organizations) Untuk Memecah Kebuntuan dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel. *UPH Journal of International Relations*, 14-27.
- Kansil, C. S. (2002). *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan.

- KEMLU. (2019, April 08). *Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Retrieved from Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb
- Kemlu RI. (2019, April 8). *List Of Multilateral Cooperation : Indonesian Membership on the UN Security Council*. Retrieved from kemlu.go.id:
https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/halaman_list_lainnya/indonesian-membership-on-the-un-security-council
- Kemlu RI. (2019, Mei 28). *Statement by Retno L.P. Marsudi Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia at The United Nations Security Council Open Debate on Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping*. Retrieved from kemlu.go.id:
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/337/pidato/statement-by-retno-lp-marsudi-minister-for-foreign-affairs-republic-of-indonesia-at-the-united-nations-security-council-open-debate-on-investing-in-peace-improving-safety-and-performanceof-un-peacekeeping>
- Kemlu RI. (2020, September 2). *Ending the UN Security Council Presidency, Indonesia Obtain World's Appreciation*. Retrieved from kemlu.go.id:
<https://kemlu.go.id/bogota/en/news/8307/ending-the-un-security-council-presidency-indonesia-obtain-worlds-appreciation>
- Kemlu RI. (2021, Juni 20). *Indonesia on The UN Security Council*. Retrieved from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/en/read/148/halaman_list_lainnya/about-indonesia-on-the-un-security-council
- Kemlu, I. (2020, Agustus 29). *Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi Indonesia tentang Penjaga Perdamaian Dunia Perempuan*. Retrieved oktober 13, 2020, from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1632/berita/dewan-keamanan-pbb-sahkan-resolusi-indonesia-tentang-penjaga-perdamaian-dunia-perempuan>
- Nation, U. (2020, October 13). *UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL*. Retrieved from un.org: <https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-council-2020>
- Osmancavusoglu, E. (2000). Female Peacekeepers in PBB and Threatment. *journal of internasional Affairs Vol 4 No 4*.
- Paramasatya, S. (2015). Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS) IJIS Vol.2, 51-62*.

- Peacewomen. (2021, Juni 29). *Why Women, Peace and Security : Background*. Retrieved from Peacewoman.org: <http://peacewomen.org/why-WPS/solutions/background>
- Plano, J. C. (1982). *The International Relations Dictionary, Third Edition*. Western Michigan University: Santa Barbara.
- Plischke, E. (1979). *Modern Diplomacy : The Art and The Artisans*. Washington DC: American Enterprise Institute.
- Rahmatika, N. (2020, November 20). *7 Langkah Penyusunan Resolusi Majelis Umum PBB*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/nara-rakhmatia/7-langkah-penyusunan-resolusi-majelis-umum-pbb-1542721946766700376>
- Roy L, S. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persaja Utama.
- Setkab, I. (2020, September 1). *Selesai Agustus 2020, Ini Capaian Indonesia Sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB*. Retrieved Oktober 2020, 13, from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/selesai-agustus-2020-ini-capaian-indonesia-sebagai-presidensi-dewan-keamanan-pbb/>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomson, L. (2012). *The Mind and Heart of The Negotiator*. Pearson.
- Trisni, S., Nasir, P. E., & Halim, A. (2019). *Diplomasi : Sebuah Pengenalan Awal*. Malang: IRDH.
- UN Security Council. (2020, Agustus 28). *Indonesia: draft resolution female peacekeepers*. Retrieved from <https://undocs.org/en/S/2020/838>
- UN Security Council. (2020, Agustus 28). *Informes that the Security Council has concluded the voting procedure on the draft resolution contained in document S/2020/838; the draft resolution received 15 votes in favour and has been adopted as resolution 2538 (2020)*. Retrieved from <https://undocs.org/en/S/2020/851>
- UN Security Council. (2020, Agustus 28). *Transmits documents related to the voting procedure in connection with the Security Council resolution 2538 (2020)*. Retrieved from <https://undocs.org/en/S/2020/856>
- UN Security Council. (2020, Agustus 28). *United Nations peacekeeping operations*. Retrieved from [https://undocs.org/en/S/RES/2538\(2020\)](https://undocs.org/en/S/RES/2538(2020))
- United Nations. (2021, Juni 29). *History*. Retrieved from [peacekeeping.un.org: https://peacekeeping.un.org/en/our-history](https://peacekeeping.un.org/en/our-history)

United Nations. (2021, Juni 20). *United Nations Security Council Report*. "Security Council Elections 2018". Retrieved from securitycouncil.org:
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/unsc_elections_2018.pdf

Zartman, I. W. (2019). Negotiation and Conflict Management: Essays on Theory and Practice. In P. E. Sofia Trisni, *Diplomasi : Sebuah Pengenalan Awal* (p. 75). Padang.